



Katalog BPS : 4102004.18

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI LAMPUNG 2012

Welfare Indicators of Lampung Province, 2012

Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung
dan
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

<http://lampung.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI LAMPUNG 2012**

Welfare Indicators of Lampung Province, 2012

<http://lampung.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Lampung, 2012

ISSN: 1907-4573

Nomor Publikasi / Publication Number: 18522.1201

Katalog BPS / BPS Catalogue: 4102004.18

Ukuran Buku / *Book Size*: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman / *Total Size*: xi + 92 halaman / *pages*

Naskah / *Manuscript*:

Bidang Statistik Sosial

Social Statistic Division

Gambar Kulit / *Cover Design*:

Bidang Statistik Sosial

Social Statistic Division

Diterbitkan oleh / *Published by*:

BPS Provinsi Lampung

BPS – *Statistic of Lampung Province*

Dicetak oleh / *Printed by*:

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012 merupakan hasil akhir dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang menyajikan informasi tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Lampung antar waktu dan perbandingan antar kabupaten/kota serta daerah tempat tinggal.

Kesejahteraan rakyat meliputi berbagai bidang kehidupan yang sangat luas, dimana tidak semuanya dapat diukur secara kuantitatif. Publikasi ini menyajikan informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pola konsumsi, kemiskinan, perumahan dan sosial lainnya. Sebagian besar data yang digunakan adalah data hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Oktober 2012

BPS PROVINSI LAMPUNG,

Kepala

Drs. AKHMAD JAELANI, M.Si

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
BAB I KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	2
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
BAB II KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat	14
2.2. Status Kesehatan	15
2.3. Status Kesehatan Balita	17
2.3.1. Pemberian ASI	17
2.3.2. Imunisasi Balita	19
2.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	20
2.4.1. Penolong Persalinan	20
BAB III PENDIDIKAN	25
3.1. Angka Melek Huruf	25
3.2. Tingkat Partisipasi Sekolah	27
3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	28
3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)	30
3.3.3. Angka Partisipasi Murni (APM)	31
3.3. Rata-Rata Lama Sekolah	33
3.4. Pendidikan Yang Ditamatkan	35
BAB IV KETENAGAKERJAAN	39

	Halaman
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI	45
5.1. Taraf Konsumsi Energi dan Protein	45
5.2. Pengeluaran Rumah Tangga	46
5.3. Distribusi Pendapatan	48
BAB VII PERUMAHAN	51
BAB VIII SOSIAL LAINNYA	57
8.1. Perjalanan Wisata	57
8.2. Akses Pada Teknologi, Komunikasi dan Informasi	58
8.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga	60

<http://lampung.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2009-2012	2
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2012	3
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten /Kota, 2011-2012	6
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan, 2009-2012	8
Tabel 1.5. Rata-Rata Anak Lahir Hidup Wanita Berumur 15-49 Tahun, 2009-2012	10
Tabel 1.6. Persentase Wanita Perkawinan Pertama Kurang Dari 16 Tahun, 2011-2012	11
Tabel 2.1. Indikator Kesehatan Provinsi Lampung, 2011-2012	17
Tabel 2.2. Persentase Anak Usia 24-59 Bulan Yang Pernah Disusi menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012	18
Tabel 2.3. Rata-rata Lama Disusui (bulan) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012	18
Tabel 2.4. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan Yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2011-2012	19
Tabel 2.5. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2011-2012	21
Tabel 2.6. Persentase Kunjungan Penduduk Yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Fasilitas Kesehatan, 2012	22
Tabel 2.7. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat/ Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2011-2012	23
Tabel 3.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	26
Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012	28

	halaman
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012	30
Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012	32
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan, 2011-2012	36
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	40
Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Jenis Kelamin, 2011-2012	41
Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Kabupaten/Kota, 2011-2012	42
Tabel 5.1. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2009-2012	45
Tabel 5.2. Pengeluaran Rata-Rata Nominal dan Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2009-2013	47
Tabel 5.3. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp), 2011	48
Tabel 5.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan Indeks Gini, 2007-2011	49
Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	52
Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	54
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	56
Tabel 8.1. Persentase Penduduk Yang Melakukan Perjalanan Wisata Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012	58
Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi, Komunikasi, dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	59

Tabel 8.3. Indikator-Indikator Raskin menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012.....	61
--	----

<http://lampung.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Jenis Kelamin, 2012	4
Gambar 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2012	7
Gambar 1.3. Komposisi Penduduk Provinsi Lampung, 2012	8
Gambar 2.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung, 2007 -2012.....	14
Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, 2011-2012	15
Gambar 2.3. Angka Kesakitan (%), 2011-2012	16
Gambar 2.4. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2012	20
Gambar 2.5. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dengan Pengobatan Sendiri, 2011-2012	23
Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas, 2008 -2012.....	26
Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2012	29
Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2012	31
Gambar 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2012	33
Gambar 3.5. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin, 2009-2012.....	34
Gambar 3.6. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Daerah Tempat Tinggal, 2009-2012	35
Gambar 3.7. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun Keatas, 2009-2012.....	36
Gambar 4.1. TPAK Provinsi Lampung, 2012	43
Gambar 4.2. TPT Provinsi Lampung, 2012	44
Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2011-2012.....	53
Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2011-2012.....	55

Gambar 7.3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012.....	56
Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi, Komunikasi, dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012	60

<http://lampung.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai aspek, pada hakekatnya adalah membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, penduduk merupakan pelaku sekaligus target dari pembangunan. Perlu diperhatikan pula bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas cenderung akan menjadi masalah dan beban pembangunan.

Dalam kaitannya mendukung pembangunan, maka informasi yang menggambarkan tentang penduduk sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta. Informasi mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, distribusi penduduk, dan komposisi penduduk dapat dijadikan informasi dasar dalam pembuatan kebijakan dibidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.

Bab ini menyajikan beberapa informasi mengenai komposisi dan distribusi penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Informasi ini berguna untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada menurut kelompok umur, jenis kelamin, maupun persebarannya.

Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, secara umum komposisi penduduk dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) karakteristik yaitu: karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan geografis. Karakteristik demografis seperti pengelompokan penduduk menurut umur, jenis kelamin, wanita usia subur, dan jumlah anak. Karakteristik sosial antara lain pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Karakteristik ekonomi antara lain dilihat dari kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan. Sedangkan karakteristik geografis merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-perdesaan, provinsi maupun kabupaten/kota.

Distribusi penduduk adalah kondisi persebaran penduduk secara keruangan. Persebaran penduduk dimaksudkan agar terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Distribusi penduduk umumnya dibedakan menjadi dua yaitu, persebaran penduduk secara geografis (berdasarkan faktor alam: iklim, kesuburan tanah, dll) dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota).

1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada Tahun 2012 jumlah penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 7.767.312 jiwa dengan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 3.998.423 jiwa dan perempuan sebanyak 3.768.889 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 dimana Sensus Penduduk dilaksanakan, jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen selama kurun waktu 2 (dua) tahun atau naik sekitar 158.907 jiwa dari tahun 2010 yang hanya 7.608.907 jiwa..

Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 7.608.405 orang terdiri atas 3.916.622 laki-laki dan 3.691.783 perempuan. Bila dibandingkan dengan data hasil sensus 2000 yang tercatat sebesar 6.730.751 jiwa, maka dalam kurun waktu 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung bertambah sebesar 13,04 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,24 persen.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2009-2012

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
2010	3 916 622	3 691 783	7 608 405
2011	3 964 479	3 726 528	7 691 007
2012	3 998 423	3 768 889	7 767 312

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.2. Penduduk laki-laki di 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin di setiap kabupaten/kota yang mencapai angka diatas 100.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2012

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Lampung Barat	227 245	200 528	427 773	113
Tanggamus	287 176	261 552	548 728	110
Lampung Selatan	480 641	451 911	932 552	106
Lampung Timur	497 071	470 933	968 004	106
Lampung Tengah	609 888	583 070	1 192 958	105
Lampung Utara	303 417	291 145	594 562	104
Way Kanan	214 672	200 406	415 078	107
Tulang Bawang	213 474	197 251	410 725	108
Pesawaran	210 683	196 792	407 475	107
Pringsewu	190 444	179 713	370 157	106
Mesuji	100 402	90 819	191 221	111
Tulang Bawang Barat	131 710	124 123	255 833	106
Bandar Lampung	456 620	446 265	902 885	102
Metro	74 980	74 381	149 361	101
Lampung	3 998 423	3 768 889	7 767 312	106

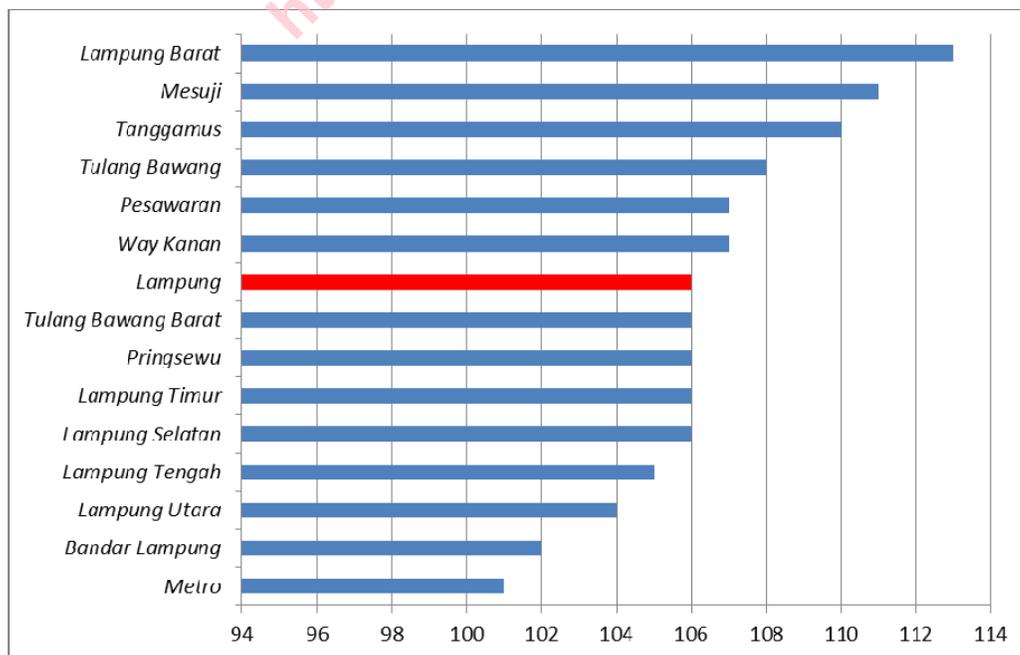
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Umumnya rasio jenis kelamin berkisar antara 95-99 laki-laki dari 100 perempuan, akan tetapi di Provinsi Lampung rasio jenis kelamin menunjukkan angka di atas 100, yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin Provinsi Lampung sebesar 106, maknanya adalah terdapat 106 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 113, tertinggi kedua adalah Kabupaten Mesuji sebesar 111, sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kota Metro sebesar 101.

Rasio jenis kelamin yang berada di atas angka 100 menarik diteliti lebih jauh penyebabnya, mengingat umumnya penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Ada beberapa kemungkinan seperti tradisi/budaya setempat yang menganggap anak laki-laki lebih diharapkan dibandingkan anak perempuan karena dapat menjaga martabat keluarga, adanya daerah-daerah yang berpotensi menarik buruh migran laki-laki, seperti daerah perkebunan, pertambangan atau industri, dapat juga dilihat pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2012



1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, apalagi jika pertumbuhan penduduk terkonsentrasi hanya pada suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika dikaitkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah ataupun lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sebesar 35.288,35 Km² yang terbagi menjadi 14 (empat belas) kabupaten/kota. Wilayah terluas berada di Kabupaten Lampung Timur seluas 5.325,03 Km² sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km².

Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, sehingga dapat diketahui berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Persebaran penduduk di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi pada wilayah administrasi kota dibandingkan dengan kabupaten, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 yang menggambarkan bahwa kepadatan penduduk pada tahun 2012 di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebesar 4.678 dan 2.417 jiwa per kilometer persegi sedangkan di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kepadatan tertinggi hanya sebesar 592 jiwa per kilometer persegi, yaitu Kabupaten Pringsewu.

Kepadatan penduduk di kota jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten, hal ini disebabkan wilayah administrasi kota identik dengan daerah perkotaan yang memiliki fasilitas lebih lengkap yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga menyebabkan penduduk dari daerah lain khususnya perdesaan pindah dan menetap serta melakukan kegiatan usaha di daerah perkotaan.

Daerah perkotaan pada umumnya adalah daerah bukan pertanian, dimana penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa, sedangkan daerah perdesaan pada umumnya daerah yang mempunyai kegiatan utama di bidang pertanian, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam.

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2012 naik menjadi 220 jiwa per kilometer persegi dibandingkan tahun 2011 sebesar 218 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2011-2012

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)	Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
			2011	2012	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lampung Barat	5 050,01	423 586	427 773	84	85
2	Tanggamus	3 020,64	542 439	548 728	180	182
3	Lampung Selatan	3 319,04	922 397	932 552	278	281
4	Lampung Timur	5 325,03	961 971	968 004	181	182
5	Lampung Tengah	3 802,68	1 183 427	1 192 958	311	314
6	Lampung Utara	2 725,87	590 620	594 562	217	218
7	Way Kanan	3 921,63	410 532	415 078	105	106
8	Tulang Bawang	3 196,32	402 226	410 725	126	128
9	Pesawaran	2 243,51	403 178	407 475	180	182
10	Pringsewu	625,00	369 336	370 157	591	592
11	Mesuji	2 184,00	189 442	191 221	87	88
12	Tulang Bawang Barat	1 201,00	253 429	255 833	211	213
13	Bandar Lampung	192,96	891 374	902 885	4 619	4 678
14	Metro	61,79	147 050	149 361	2 380	2 417
Provinsi Lampung		35 288,35	7 691 007	7 767 312	218	220

Sumber: 1) BPS Provinsi Lampung

2) Undang-Undang dan Perda Provinsi Lampung

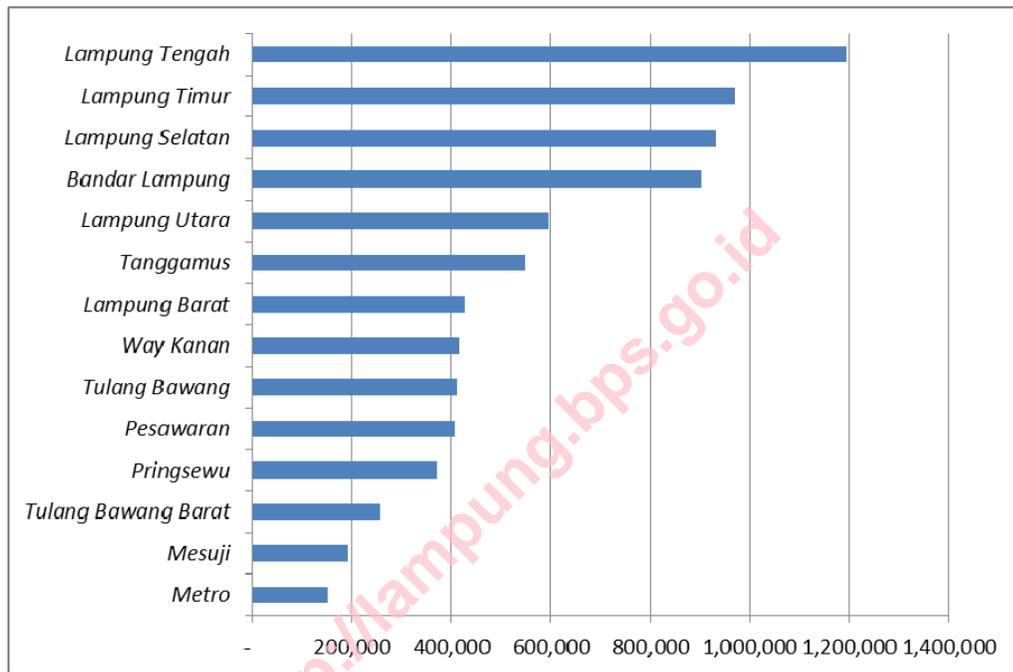
Keterangan:

- 1) UU No. 12 Tahun 1999
- 2) UU No. 33 Tahun 2007
- 3) UU No. 48 Tahun 2008
- 4) UU No. 49 Tahun 2008
- 5) UU No. 50 Tahun 2008
- 6) UU No. 22 Tahun 2012
- 7) Perda No. 1 Tahun 2010

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui pula jumlah penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2011-2012. Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 1.192.958 jiwa pada tahun 2012 dengan kepadatan penduduk sebesar 314 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan

jumlah penduduk terendah adalah Kota Metro dengan jumlah penduduk sebesar 149.361 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.417 jiwa per kilo meter persegi. Kota Metro memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dikarenakan luas wilayahnya yang kecil hanya seluas 61,79 kilometer persegi.

Gambar 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2012



Tabel 1.4 memperlihatkan komposisi penduduk usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun keatas, dari komposisi tersebut diketahui pada tahun 2012 penduduk usia produktif di Provinsi Lampung sebesar 66,79 persen sedangkan penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari usia muda dan tua adalah sebesar 28,61 persen dan 4,80 persen.

Dari komposisi penduduk ini dapat diketahui angka beban tanggungan penduduk yang dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif.

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa beban ketergantungan di Provinsi Lampung tahun 2012 sebesar 50,17, angka ini memiliki makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 50 orang penduduk usia tidak produktif, yang 43 orang diantaranya berasal dari usia muda dan 7 orang lainnya berasal dari usia tua.

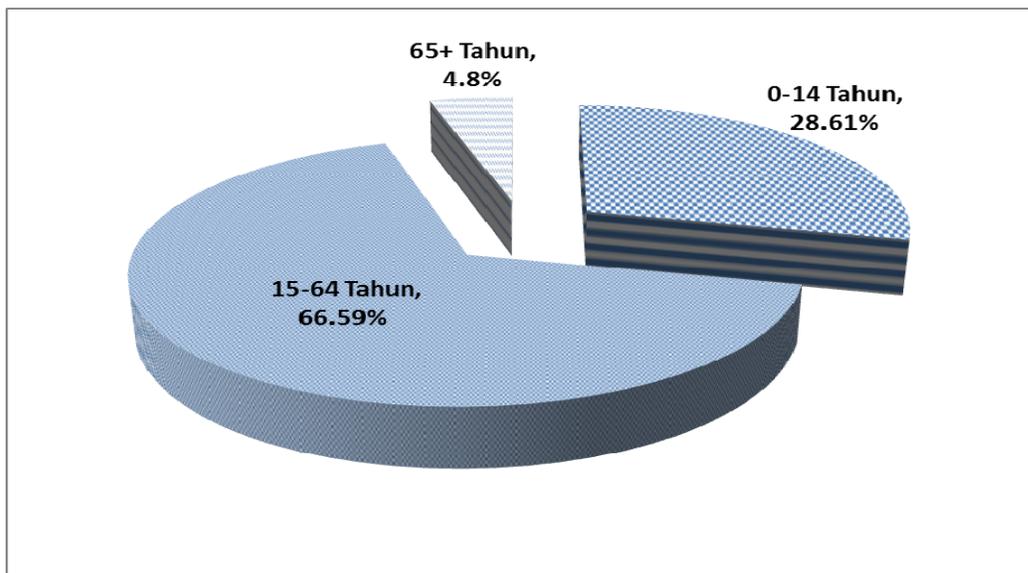
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan, 2009-2012

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	30,81	65,04	4,15	53,75
2010	29,45	65,69	4,86	52,23
2011	29,44	65,70	4,86	52,20
2012	28,61	66,59	4,80	50,17

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Untuk dapat mengetahui seberapa besar angka beban tanggungan yang berasal dari penduduk usia muda dapat dilakukan dengan membandingkan penduduk muda dengan penduduk produktif, begitu pula dengan angka beban tanggungan usia tua didapat dari perbandingan antara penduduk usia tua dengan penduduk usia produktif.

Gambar 1.3. Komposisi Penduduk Provinsi Lampung, 2012



Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang sifatnya menambah jumlah penduduk. Kelahiran berkaitan dengan tingkat kesuburan seorang wanita untuk dapat bereproduksi. Bertambahnya umur seorang wanita akan berpengaruh terhadap fertilitasnya, semakin bertambah umur seorang wanita maka tingkat fertilitasnya akan semakin menurun. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak akan cukup besar. Sementara itu, wanita pada kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak.

Dalam fertilitas dikenal beberapa konsep tentang kelahiran, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan abortus. Lahir hidup merupakan kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya bayi di dalam kandungan, dimana ketika bayi dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti, bernafas, jantung berdenyut, gerakan-gerakan, dan lain-lain. Lahir mati merupakan kelahiran seorang bayi dari kandungannya yang baru mulai sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, sedangkan abortus adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, abortus ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja (spontan).

Angka rata-rata anak lahir hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok wanita selama masa reproduksinya. Dari tabel 1.5 diketahui bahwa di Provinsi Lampung rata-rata anak lahir hidup wanita usia 15-49 tahun dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami kenaikan yaitu 2,3 menjadi 2,4. Ini berarti baik tahun 2011 maupun 2012, rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia 15-49 antara 2 hingga 3 anak.

Anak lahir hidup tertinggi berada di Kabupaten Tanggamus sebesar 2,7 kemudian Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang yang memiliki angka yang sama yaitu 2,5. Apabila dilihat menurut tipe daerah, anak lahir hidup pada tahun 2012 di daerah perdesaan lebih tinggi yaitu 2,4 dibandingkan dengan daerah perkotaan sebesar 2,3.

Tabel 1.5. Rata-Rata Anak Lahir Hidup Wanita Berusia 15-49 Tahun, 2011-2012

Kabupaten/Kota	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1) (2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1 Lampung Barat	2,8	2,6	,5	2,5	2,5	2,5
2 Tanggamus	2,4	2,4	,6	2,7	2,6	2,7
3 Lampung Selatan	2,4	2,5	,4	2,5	2,4	2,5
4 Lampung Timur	2,1	2,1	,1	2,2	2,1	2,1
5 Lampung Tengah	2,6	2,7	,3	2,3	2,3	2,3
6 Lampung Utara	2,4	2,4	,5	2,6	2,5	2,5
7 Way Kanan	2,1	2,3	,4	2,4	2,4	2,4
8 Tulang Bawang	3,2	3,2	,3	2,4	2,4	2,5
9 Pesawaran	2,5	2,0	,4	2,3	2,4	2,3
10 Pringsewu	2,3	2,4	,3	2,3	2,3	2,3
11 Mesuji	2,2	2,2	,3	2,3	2,3	2,3
12 Tulang Bawang Barat	2,1	2,2	,2	2,1	2,2	2,1
13 Bandar Lampung	2,2	2,3	,1	3,1	2,2	2,4
14 Metro	2,2	2,1	,1	2,0	2,2	2,1
Provinsi Lampung	2,3	2,3	,3	2,4	2,3	2,4

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Perkawinan merupakan komitmen bersama yang dibuat dengan tujuan penyatuan pria dan wanita untuk mendapatkan pengakuan hukum, agama dan masyarakat sebagai suami istri maupun orang tua. Di Indonesia ada peraturan batas usia perkawinan yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang (UU), menurut UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, karena dapat memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko yang cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, terutama pada keselamatan ibu dan bayi, selain itu masa reproduksi wanita yang menikah di usia muda akan lebih lama sehingga mempunyai kemungkinan untuk memiliki anak lebih banyak. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi merupakan salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Tabel 1.6. Persentase Wanita Perkawinan Pertama Kurang dari 16 Tahun, 2011-2012

Kabupaten/Kota	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Lampung Barat	1,37	2,38	12,92	17,90	12,04	16,67
2 Tanggamus	11,95	9,40	11,35	16,99	11,46	15,77
3 Lampung Selatan	10,94	14,14	14,12	12,59	13,31	12,99
4 Lampung Timur	7,53	8,46	12,68	10,00	12,30	9,88
5 Lampung Tengah	14,27	6,76	11,08	10,59	11,39	10,20
6 Lampung Utara	5,71	7,16	9,01	12,68	8,34	11,56
7 Way Kanan	6,29	10,09	13,81	10,07	13,48	10,07
8 Tulang Bawang	6,93	3,08	14,67	15,28	13,89	13,75
9 Pesawaran	10,53	12,32	9,94	6,74	9,98	7,20
10 Pringsewu	7,06	8,30	12,20	11,69	10,43	10,54
11 Mesuji	8,42	9,70	16,73	16,65	16,48	16,46
12 Tulang Bawang Barat	5,73	8,04	14,42	10,95	13,68	10,67
13 Bandar Lampung	6,81	6,08	15,23	11,95	6,89	6,15
14 Metro	7,29	4,61	6,18	11,42	7,27	4,75
Provinsi Lampung	8,02	7,55	12,37	12,14	11,31	11,01

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

. Tabel 1.6 menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2012 ada kecenderungan wanita di Provinsi Lampung mulai menunda perkawinannya, tahun 2011 wanita yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun mencapai 11,31 persen sedangkan tahun 2012 persentase wanita yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun turun menjadi 11,01 persen.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten yang persentasenya naik, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, dan Pringsewu. Persentase tertinggi berada di Kabupaten Lampung Barat sebesar 16,67 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kota Metro yang hanya sebesar 4,75 persen.

<http://lampung.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Dengan ketersediaan gizi baik dan seimbang akan mendukung kualitas kesehatan dalam kehidupan manusia. Kesehatan yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun upaya yang dilakukan pemerintah tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka secara mandiri, hanya sedikit yang akan dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia.

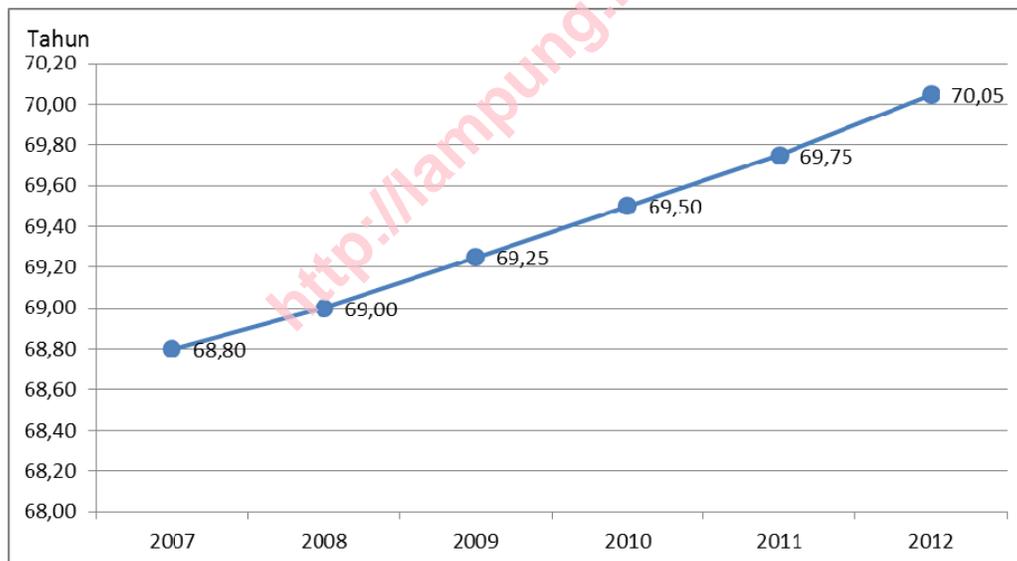
Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan pemerintah lain meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Terwujudnya masyarakat Indonesia dengan derajat kesehatan yang tinggi merupakan tujuan pokok pembangunan bidang kesehatan, dimana bisa diketahui dari indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup secara nasional diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Dalam publikasi ini, penghitungan angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung (*indirect method*). Angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar 68,80, menjadi 70,05 pada tahun 2012 (gambar 2.1). Hal tersebut merupakan indikasi bahwa kesehatan masyarakat penduduk Provinsi Lampung relatif meningkat. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh anak-anak yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan akan hidup sampai umur 70,05 tahun.

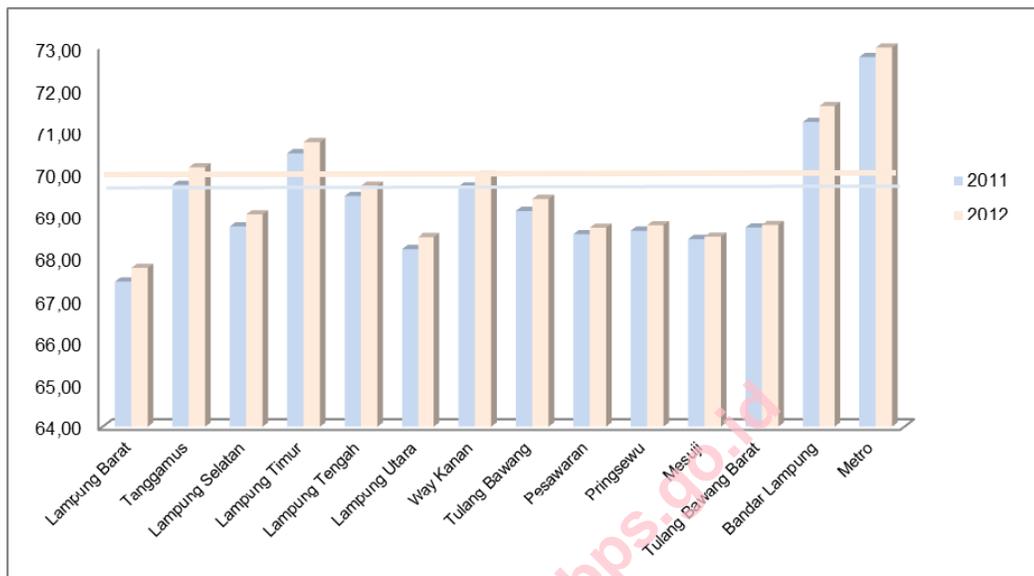
Gambar 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung, 2007-2012



Sementara, angka harapan hidup menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. Angka harapan hidup seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dibanding angka harapan hidup tahun sebelumnya, artinya terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai capaian angka harapan hidup yang terendah yaitu 67,77 tahun sebaliknya Kota Metro

mempunyai capaian angka harapan hidup tertinggi yaitu 72,98 tahun.

Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, 2011-2012



Gambaran mengenai angka harapan hidup di 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2., terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang angka harapannya berada di atas angka harapan hidup provinsi yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedikit berbeda dengan tahun 2011, dimana Kabupaten Tanggamus angka harapannya dibawah angka provinsi.

2.2. Status Kesehatan

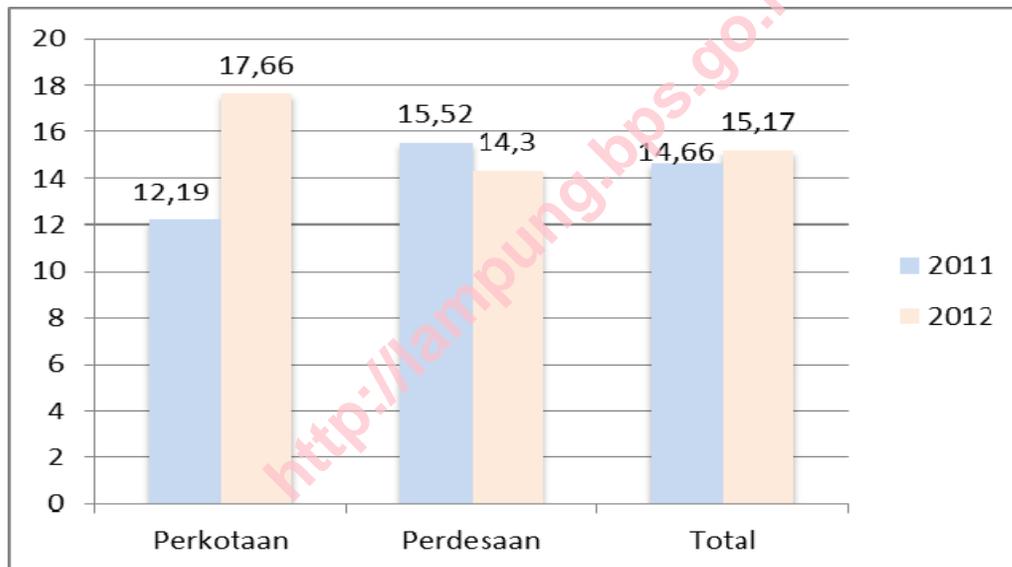
Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu, periode yang digunakan adalah sebulan yang lalu sebelum pencacahan. Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik, maka segala aktifitas kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang

lebih lama dan bekerja lebih optimal. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi.

Gambar 2.3 Angka Kesakitan (%), 2011-2012



Hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding tahun 2011, demikian pula dengan angka kesakitan. Pada tahun 2011 angka kesakitan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih rendah dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Tidak demikian dengan tahun 2012 dimana angka kesakitan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan masing-masing sebesar 17,66 persen dan 14,3 persen.

Tabel 2.1 Indikator Kesehatan Provinsi Lampung, 2011-2012

Indikator Kesehatan	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan	25,58	34,39	32,32	30,71	30,59	31,67
Angka Kesakitan	12,19	17,66	15,52	14,3	14,66	15,17
Rata-rata Lama Sakit	5,07	4,72	5,36	5,4	5,3	5,19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Rata-rata lama sakit merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk. Meningkatnya angka kesakitan pada tahun 2012 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih buruk, jika tidak diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sakit. Rata-rata lama sakit tahun 2012 menurun dibanding tahun 2011 yaitu dari 5,3 hari menjadi 5,19 hari. Angka kesakitan yang meningkat dengan rata-rata lama sakit yang menurun mempunyai arti bahwa keluhan kesehatan (penyakit) yang dialami penduduk Lampung tidak cukup serius yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

2.3. Status Kesehatan Balita

2.3.1. Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama bayi dan paling penting bagi proses tumbuh kembang anak karena terbukti memiliki manfaat sangat besar bagi kesehatan. Manfaat tersebut antara lain berguna untuk kecerdasan, pertumbuhan dan perkembangan anak karena ASI mengandung zat-zat gizi yang sangat lengkap dan berkualitas tinggi. Selain itu, ASI juga mengandung zat antibodi (*colostrum*) yang melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, ASI sangat dianjurkan agar diberikan kepada bayi berusia 6 bulan pertama secara eksklusif dan selanjutnya bersama dengan makanan tambahan, ASI diberikan hingga usia 2 tahun. Semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat

pertumbuhan dan kesehatannya. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi merupakan salah satu indikator kesehatan balita yang dapat diukur.

Tabel 2.2. Persentase Anak Usia 24 – 59 bulan yang Pernah Disusui menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Pemberian ASI		
	2010	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)
Perkotaan	94,75	94,99	91,51
Perdesaan	95,54	95,23	96,54
Perkotaan + Perdesaan	95,33	95,16	95,36

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Tujuan menyajikan persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui adalah dapat diketahui berapa persen dari anak-anak yang berusia diatas 2 tahun (24-59 bulan) yang pada saat usia mereka 0-23 bulan pernah disusui. Dari tabel 2.2. menunjukkan bahwa dari anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui pada saat usia mereka 0-23 tahun sebesar 95,33 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,36 persen pada tahun 2012. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui pada saat usia 0-23 bulan yang tinggal di perdesaan lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2012 persentase anak usia 24-59 bulan yang pernah disusui di perdesaan sebesar 96,54 persen sedangkan di perkotaan sebesar 91,51 persen.

Tabel 2.3. Rata-rata Lama Disusui (bulan) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012

Daerah Tempat Tinggal	Rata-rata Lama Disusui (bulan)		
	2010	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)
Perkotaan	18,32	18,28	17,68
Perdesaan	19,77	18,97	18,92
Perkotaan + Perdesaan	19,39	18,79	18,64

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui, dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu 19,39 bulan pada tahun 2010 menurun menjadi 18,64 bulan. Rata-rata lama bayi disusui di perkotaan lebih rendah dibanding di perdesaan, pada tahun 2012 rata-rata lama bayi disusui sebesar 17,68 bulan di perkotaan sedangkan di perdesaan sebesar 18,92 bulan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang anak usia 24-59 bulan di perdesaan untuk mendapat tingkat imunitas dan pertumbuhan lebih baik dibanding di perkotaan. Hal ini dimungkinkan ibu-ibu yang tinggal di perdesaan mempunyai lebih banyak waktu untuk menyusui dibandingkan dengan ibu-ibu yang tinggal di perkotaan yang cenderung menjadi wanita pekerja.

2.3.2. Imunisasi Balita

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Minimal terdapat 5 (lima) jenis imunisasi dasar yang dianjurkan untuk diberikan kepada balita. Kelima jenis imunisasi tersebut antara lain BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B.

Tabel 2.4. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi, 2011-2012

Jenis Imunisasi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	96,57	96,33	96,86	97,58	96,79	97,28
DPT	96,33	96,67	96,05	97,21	96,12	97,08
Polio	95,39	96,89	95,98	96,97	95,83	96,95
Campak/Morbili	92,64	94,24	93,72	95,92	93,44	95,52
Hepatitis B	94,62	95,02	94,52	96,41	94,54	96,07

Hasil Susenas tahun 2011 dan 2012, pada umumnya anak umur 12-59 bulan yang mendapat imunisasi dasar sudah mencapai lebih dari 90 persen dimana balita

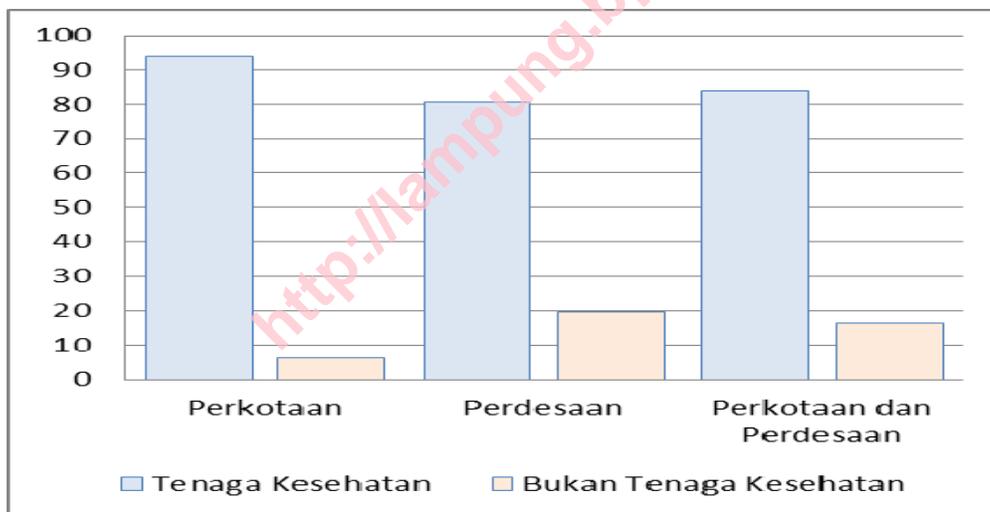
yang tinggal di pedesaan lebih banyak mendapat imunisasi dibanding yang tinggal di perkotaan.

2.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

2.4.1. Penolong Persalinan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu salah satunya dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penanganan proses persalinan secara tepat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan. Penolong persalinan akan ideal apabila dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter, bidan atau tenaga medis lain.

Gambar 2.4. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2012



Dari hasil suse nas tahun 2012, dapat diketahui bahwa persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibanding bukan tenaga kesehatan namun di daerah pedesaan penolong persalinan oleh tenaga bukan kesehatan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Hal ini sangat diperlukan program pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa sehingga mempermudah akses masyarakat di pedesaan.

Tabel 2.5. Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2011-2012

Penolong Persalinan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan						
Dokter	21,36	12,81	7,84	9,52	11,33	10,33
Bidan	71,24	80,57	67,69	70,27	68,61	72,81
Tenaga Paramedis Lainnya	1,19	0,55	0,93	0,72	1,00	0,68
Bukan Tenaga Kesehatan						
Dukun Bersalin	5,56	5,74	23,19	19,29	18,63	15,95
Famili/keluarga/lainnya	0,65	0,33	0,35	0,2	0,43	0,23

BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 80,94 persen pada tahun 2011 menjadi 83,82 persen pada tahun 2012. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatkan peran bidan sebagai penolong persalinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun penolong persalinan oleh dokter selama tahun 2011-2012 mengalami penurunan dari 11,33 persen menjadi 10,33 persen yang disebabkan menurunnya penolong persalinan oleh dokter di perkotaan. Ternyata masih ada yang melakukan persalinan dengan memanfaatkan tenaga dukun bersalin terutama di daerah perdesaan walaupun persentasenya terus menurun yaitu 18,63 persen pada tahun 2011 turun menjadi 15,95 persen pada tahun 2012.

Penolong persalinan menurut kabupaten/kota bisa dilihat pada lampiran, dimana penolong persalinan oleh bidan sudah diatas 50 persen kecuali Kabupaten Mesuji (48,06 persen) bahkan Kabupaten Pringsewu berada diatas 90 persen (92,76 persen). Penolong persalinan oleh dukun bersalin masih cukup tinggi di Kabupaten Mesuji (44,83 persen) sebaliknya Kota Metro tidak ditemukan balita yang ditolong kelahirannya oleh dukun bersalin. Hal ini diduga erat kaitannya dengan akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan.

Akses masyarakat dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan jika mengalami keluhan sakit sehingga harus berobat jalan/inap.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk terkait dengan kondisi ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Penduduk perkotaan lebih banyak memanfaatkan fasilitas praktek dokter/poliklinik karena lebih mudah dijangkau dan lebih cepat ditangani. Pada tahun 2012 sebanyak 35,31 persen kunjungan penduduk perkotaan berobat jalan ke praktek dokter/poliklinik, 23,92 persen berobat jalan ke puskesmas/puskesmas pembantu.

Tabel 2.6. Persentase Kunjungan Penduduk yang berobat jalan selama sebulan terakhir menurut fasilitas kesehatan, 2012

Fasilitas Kesehatan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	6,24	2,93	3,84
RS Swasta	5,72	1,95	2,99
Praktek dokter/poliklinik	35,31	17,36	22,3
Puskesmas/Pustu	23,92	24,46	24,31
Praktek Tenaga Kesehatan	23,22	48,87	41,81
Praktek pengobatan tradisional	2,22	2,27	2,25
Dukun Bersalin	0,77	0,47	0,55
Lainnya	2,6	1,69	1,94

BPS Provinsi Lampung, Susenas 2012

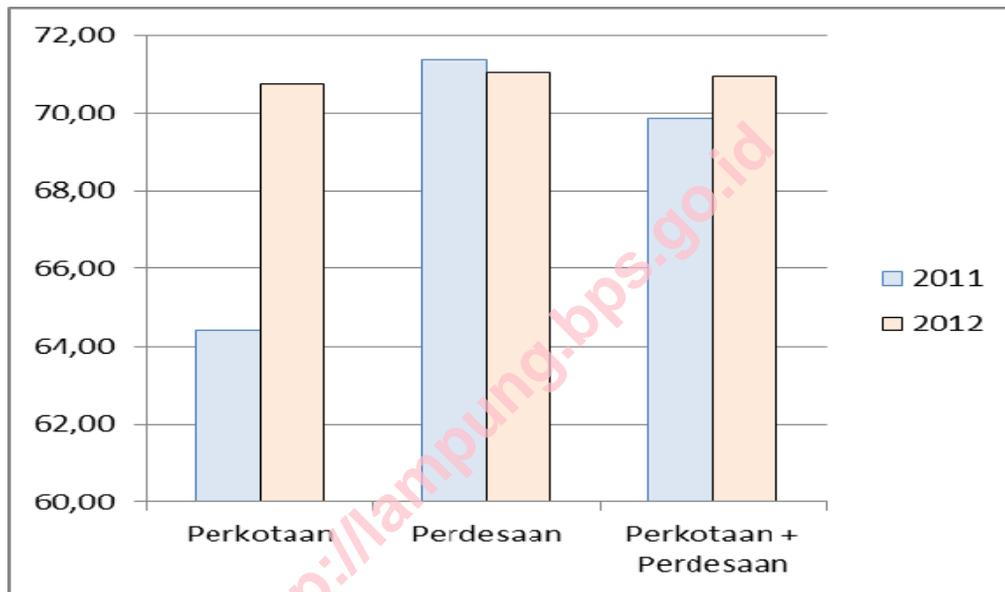
Sementara itu, penduduk perdesaan pada tahun 2012 cenderung memilih tempat berobat ke praktek tenaga kesehatan yaitu sekitar 48,87 persen dan 24,46 persen ke puskesmas/puskesmas pembantu, karena kedua fasilitas tersebut mudah dijangkau oleh penduduk di perdesaan. Secara keseluruhan fasilitas berobat jalan yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk Lampung adalah praktek tenaga kesehatan sebesar 41,81 persen.

Selain berobat jalan, penduduk yang mengalami keluhan (sakit) dapat mengobati sendiri. Hasil susenas menunjukkan persentase penduduk yang berobat sendiri sebesar 70,98 persen pada tahun 2012 meningkat dibanding tahun 2011 (69,87 persen) gambar Penduduk yang berobat sendiri menggunakan jenis obat/cara pengobatan tradisional, modern, lainnya serta gabungan antara ketiganya.

Dari tabel ... terlihat bahwa jenis obat modern lebih banyak dipilih oleh penduduk dalam mengobati sendiri keluhan yang dialami yaitu sebesar 69,81 persen. Pilihan kedua adalah mengobati dengan obat modern dan cara tradisional sebesar

16,92 persen, artinya penduduk mengobati keluhan kesehatannya dengan obat yang digunakan dalam sistem kedokteran dan obat tradisional yang dibuat dari bahan tanaman, hewan, mineral dan lain-lain. Jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal perbedaan jenis obat/ cara pengobatan yang digunakan tidak cukup signifikan antara perkotaan dan perdesaan.

Gambar 2.5. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan dengan Pengobatan Sendiri, 2011-2012



Tabel 2.7. Persentase Penduduk yang berobat Sendiri menurut Jenis Obat/Cara Pengobatan yang digunakan, 2011-2012

Jenis Obat/Cara Pengobatan yang Digunakan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	8,74	7,80	9,07	6,56	9,00	6,91
Modern	72,96	70,47	68,31	69,55	69,23	69,81
Lainnya	2,26	1,65	1,12	1,67	1,34	1,67
Tradisional dan Modern	12,29	16,61	16,07	17,05	15,32	16,92
Tradisional dan Lainnya	0,64	0,34	1,17	0,60	1,07	0,53
Modern dan Lainnya	2,54	2,20	2,25	2,78	2,31	2,62
Tradisional, Modern dan Lainnya	0,57	0,95	2,02	1,79	1,73	1,55

BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012



<http://lampung.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu pendidikan memiliki peranan strategis sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan. Melalui pendidikan, beragam jenis teknologi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk. Sehingga pemerintah selalu mengupayakan program-program peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, program biaya sekolah dan berbagai program beasiswa.

Keberhasilan program-program tersebut dapat diketahui melalui berbagai macam indikator pendidikan. BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghasilkan beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (Mys), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Dasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan.

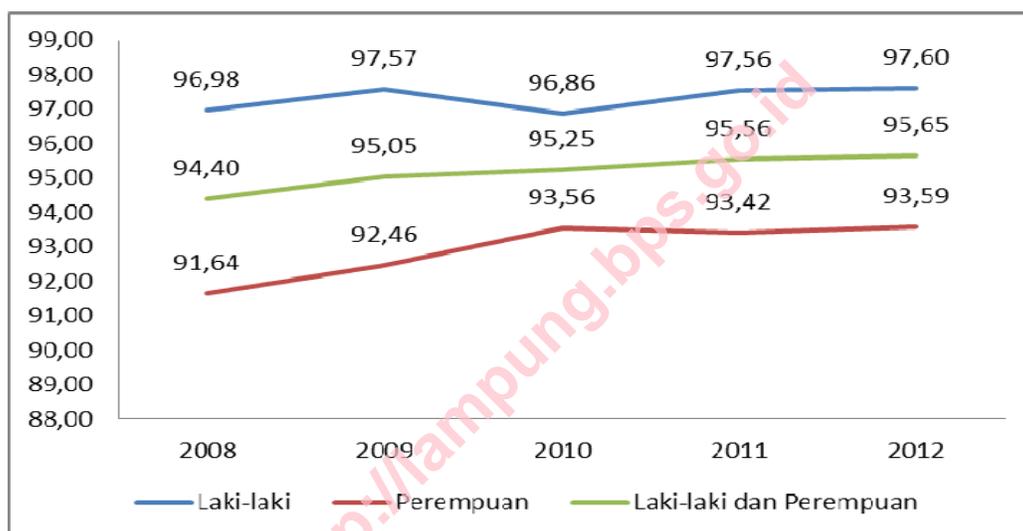
3.1. Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 10 tahun keatas atau sering disebut sebagai Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah angka yang dipakai untuk menyatakan persentase penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis baik itu menggunakan huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Angka ini bermanfaat untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu

pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH mencerminkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang melek huruf meningkat dari tahun ke tahun (gambar 3.). Peningkatan AMH tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pemberantasan buta huruf, melalui program pemberantasan buta aksara dan program keaksaraan fungsional. Selain itu juga didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Keatas, 2008-2012



Tabel 3.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan dan Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-14	99,68	99,81	99,12	98,94	99,25	94,14
15-19	99,59	99,67	99,45	99,36	99,49	99,45
20-24	99,56	99,75	99,09	99,26	99,21	99,40
25-34	99,61	99,59	99,29	99,70	99,37	99,67
35 +	95,30	95,37	89,27	89,33	90,81	90,88
10 +	97,72	97,81	94,81	94,89	95,56	95,65
Laki-laki	98,89	98,98	97,11	97,12	97,56	97,60
Perempuan	96,52	96,60	92,31	92,50	93,42	93,59

BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa AMH penduduk Provinsi Lampung usia 10 tahun keatas lebih dari 90 persen baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan. Jika dilihat menurut kelompok umur, penduduk usia 10-34 tahun memiliki AMH hampir 100 persen, namun penduduk usia 35 keatas hanya berkisar 90 persen bahkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan di bawah 90 persen sehingga pemerintah perlu menggalakkan program pemberantasan buta aksara dan program keaksaraan fungsional khususnya bagi penduduk usia 35 tahun keatas di daerah perdesaan.

AMH Penduduk usia 10 tahun keatas menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. AMH Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi yaitu 98,66 persen yang berarti di atas 90 penduduk Bandar Lampung yang berusia 10 tahun keatas, terdapat 99 orang telah melek huruf, posisi berikutnya Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran sebesar 97,94 persen dan 97,12 persen, sebaliknya Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan AMH terendah yaitu 93,46 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding AMH penduduk perempuan di seluruh kabupaten/kota namun Kabupaten Lampung Selatan terdapat perbedaan yang cukup besar (5,40 persen) sebaliknya Kota Bandar Lampung perbedaannya kecil yaitu 1,32 persen. Hal ini masih memperlihatkan adanya kesenjangan gender, artinya masih kurangnya kesetaraan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

3.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Upaya pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengejar ketertinggalan masyarakat di bidang pendidikan dilakukan dengan berbagai upaya pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, di mulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk

mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah, terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur usia yang sama. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dan kelompok pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun. APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.2.

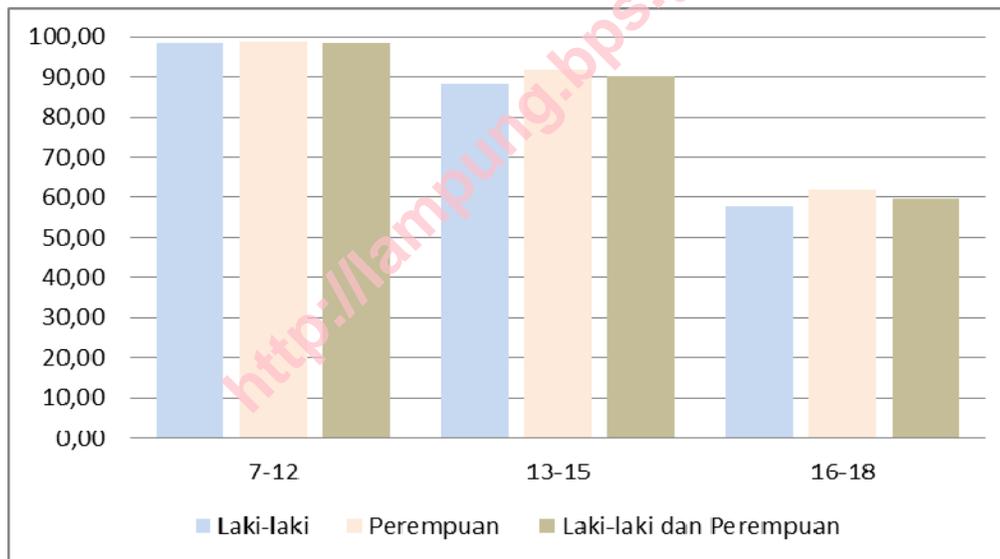
Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012

APS	Jenis Kelamin	2010	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)	(5)
	Laki-laki + Perempuan	98,71	97,90	98,59
7 – 12	Laki-laki	98,63	98,07	98,42
	Perempuan	98,80	97,71	98,78
	Laki-laki + Perempuan	86,62	85,85	90,03
13 – 15	Laki-laki	84,23	82,97	88,29
	Perempuan	89,11	89,11	91,79
	Laki-laki + Perempuan	51,34	55,41	59,80
16 – 18	Laki-Laki	51,63	51,67	57,77
	Perempuan	51,02	59,78	61,97

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah sebesar 98,59 persen artinya masih ada 1,41 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah. Demikian pula dengan penduduk usia 13-15 yang tidak sekolah sebesar 9,97 persen. Hampir separuh dari penduduk usia 16-18 tahun belum menikmati bangku sekolah yaitu 40,20 persen. APS 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun belum mencapai 100 persen dimana kedua kelompok usia ini masuk dalam program wajib belajar 9 tahun pada hal pemerintah telah memberikan bantuan sekolah untuk siswa yang dianggap miskin melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Belum optimalnya capaian APS disebabkan karena masih adanya kasus putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan masih ada penduduk yang tidak pernah sekolah.

Gambar 3.2. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2012



Jika dilihat dari sudut gender, tidak terdapat perbedaan yang berarti pada partisipasi sekolah laki-laki dengan perempuan. Penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk bersekolah. Hasil Susenas tahun 2012 mengindikasikan bahwa APS laki-laki dan APS perempuan hampir sama di semua jenjang pendidikan.

Disparitas gender pada level partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun cukup kecil yaitu laki-laki sebesar 98,42 persen dan perempuan sebesar 98,78 persen. Namun semakin tinggi jenjang pendidikan disparitas pendidikan antara laki-laki dan

perempuan semakin tinggi dimana penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK mencerminkan partisipasi dan akses penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sebagai contoh terdapat anak-anak dibawah usia 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD atau anak usia 13 tahun masih bersekolah di SD.

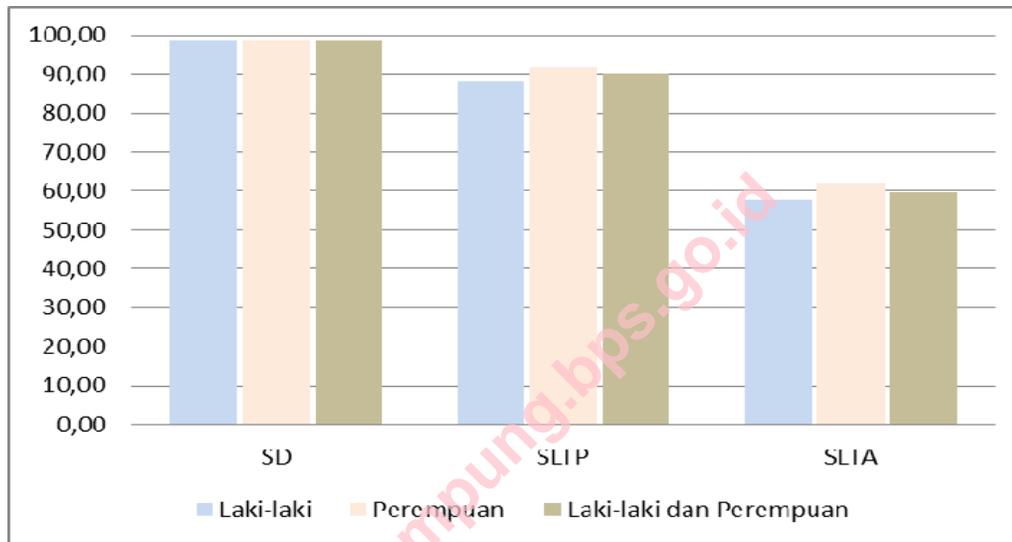
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012

APK	Jenis Kelamin	2010	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)	(5)
L	aki-laki + Perempuan	111,18	103,78	106,84
SD L	aki-laki	111,90	105,06	107,58
Pe	empuan	110,38	102,38	106,06
L	aki-laki + Perempuan	82,05	88,61	93,25
SLTP L	aki-laki	82,48	84,12	90,49
Pe	empuan	81,59	93,70	96,06
	Laki-laki + Perempuan	57,81	60,71	61,16
SLTA L	aki-Laki	54,63	56,30	58,18
Pe	empuan	61,27	65,86	64,34

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Pada tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2012, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 106,84 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD lebih dari 100 persen karena terdapat anak yang belum mencukupi umur (usia dibawah 7 tahun) sudah bersekolah SD atau anak yang melebihi umur yang seharusnya (usia lebih dari 12 tahun) masih duduk di bangku SD.

Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin, 2012



Berdasarkan jenis kelamin, APK laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APK perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APK laki-laki lebih rendah dibanding APK perempuan.

3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM untuk mengukur anak yang bersekolah tepat pada waktu dengan kata lain APM dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2010-2012

APK	Jenis Kelamin	2010	2011	2012
(1) (2)		(3)	(4)	(5)
L	aki-laki + Perempuan	95,20	91,47	93,48
SD L	aki-laki	95,64	92,83	93,59
Pe	perempuan	94,72	89,98	93,36
L	aki-laki + Perempuan	69,61	66,56	71,64
SLTP L	aki-laki	70,37	63,61	69,40
Pe	perempuan	68,82	69,90	73,90
	Laki-laki + Perempuan	41,97	45,06	45,56
SLTA L	aki-Laki	42,82	40,45	44,28
Pe	perempuan	41,05	50,46	46,94

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Nilai APM selalu lebih rendah dibanding nilai APK, hal ini disebabkan oleh murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, lulus lebih awal (kelas akselerasi), menunda/mempercepat saat mulai sekolah. Keterbatasan APM adalah tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun, lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat, selain itu referensi tanggal masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir dari semua kelompok yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan.

Pada tabel 3.4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2012, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 93,48 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD sesuai dengan kelompok umur yang direkomendasikan (7-12 tahun) atau bersekolah tepat waktu sebesar 93,48 persen. Demikian halnya dengan yang bersekolah tepat waktu SLTP sebesar 71,64 persen dan bersekolah tepat waktu SLTA sebesar 45,56 persen (tabel 3.4).

Seperti halnya dengan APK, APM menurut jenis kelamin mempunyai pola yang sama yaitu APM laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APM perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APM laki-laki lebih rendah

dibanding APM perempuan (gambar 3.4).

Gambar 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2012

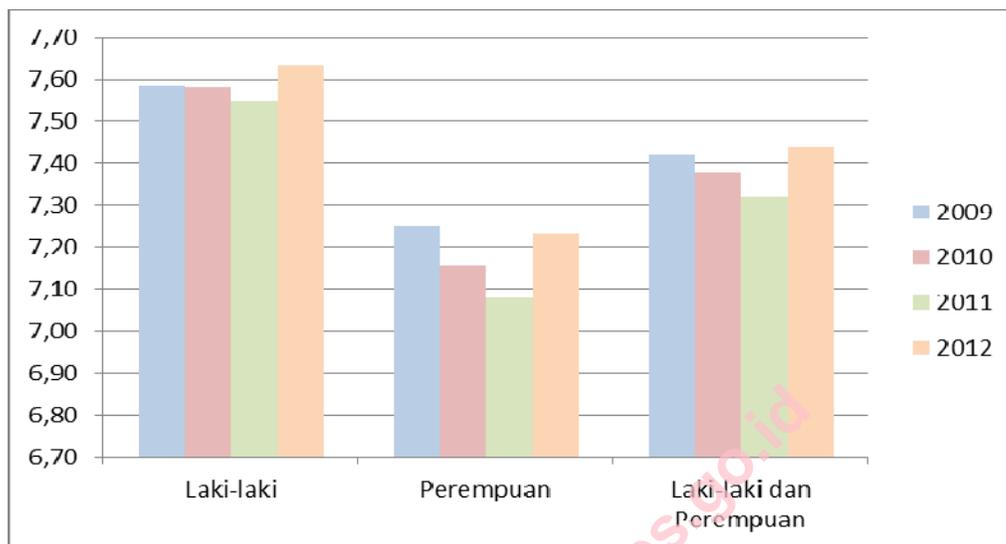


3.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun.

Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang telah dicantumkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun atau lebih.

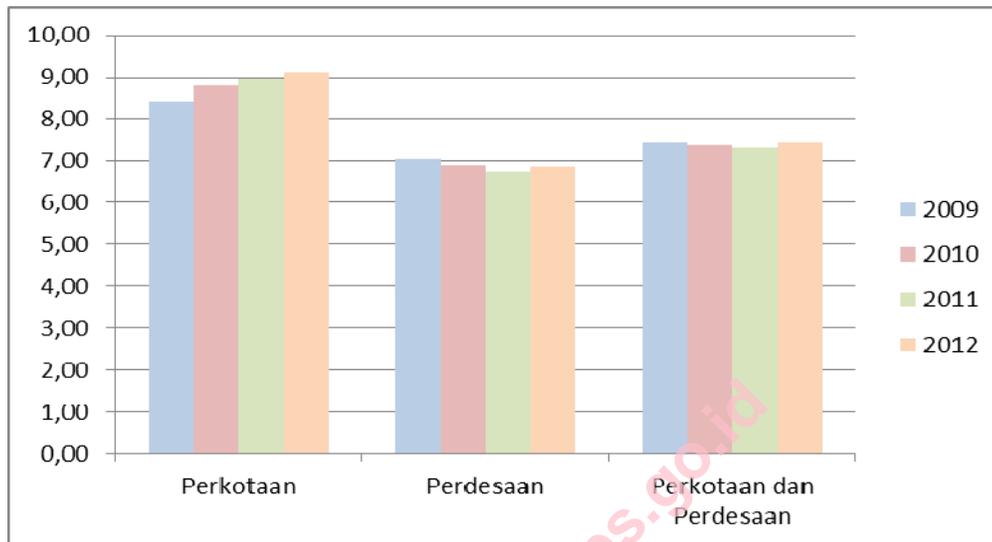
Gambar 3.5. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 10 tahun keatas menurut Jenis Kelamin, 2009-2012



Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung dari tahun 2009 hingga tahun 2012 masih se kitar 7 tahun yang artinya penduduk di Provinsi Lampung rata-rata menikmati pendidikan sampai kelas 1 SLTP (gambar 3.5). Hal ini berarti, program wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga diperlukan keseriusan pemerintah untuk bekerja lebih keras mendukung keberhasilan program tersebut.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata lama sekolah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2012 telah mencapai 9,13 tahun sebaliknya penduduk yang tinggal di daerah perdesaan masih 6,84 tahun. Hal ini berarti penduduk perkotaan telah mengenyam pendidikan formal jauh lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan sehingga perlu kerja keras pemerintah untuk menggenjot peningkatan pendidikan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan.

Gambar 3.6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 10 tahun keatas menurut Daerah Tempat Tinggal, 2009-2012



Rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran di mana Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun, yang artinya penduduk di Kota Bandar Lampung dan Metro telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTP. Sebaliknya terdapat 4 kabupaten yang rata-rata lamanya masih sekitar 6 tahun yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan dan Mesuji artinya penduduk di kabupaten tersebut penduduknya rata-rata baru sampai kelas 6 SD.

3.4. Pendidikan yang Ditamatkan

Belum tercapainya target dari program wajib belajar 9 tahun juga tercermin dari data persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Pada tabel 3.7 tampak bahwa lebih dari 50 persen penduduk Lampung tidak mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi. Komposisi yang lebih tepat yaitu 27,04 persen penduduk belum tamat SD, di mana di dalamnya terdapat 3,68 persen penduduk yang belum/tidak pernah sekolah. Kemudian sebesar 29 persen penduduk mampu menamatkan pendidikan hanya sampai tingkat SD. Sedangkan yang mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan

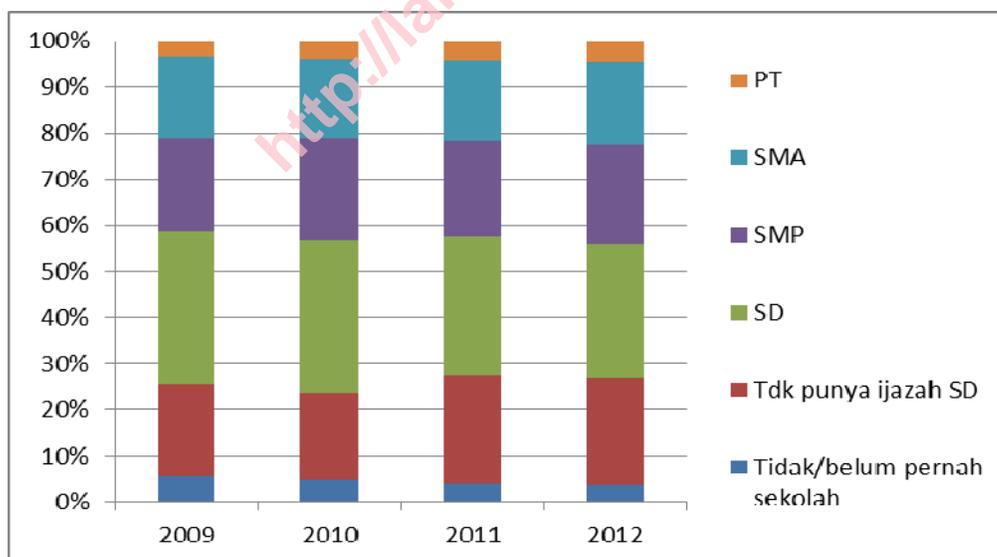
tinggi sebesar 21,48 persen untuk jenjang SLTP, 18,11 persen untuk jenjang SLTA dan 4,37 persen untuk jenjang di atas SLTA atau perguruan tinggi.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, 2011-2012

Jenjang Pendidikan yang ditamatkan	2011			2012		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Tidak Pernah Sekolah	2,16	6,00	4,02	1,84	5,64	3,68
Belum tamat SD	22,79	24,06	23,40	23,63	23,06	23,35
Sekolah Dasar	31,10	29,12	30,14	29,09	28,90	29,00
SLTP 20,72		20,76	20,74	21,69	21,25	21,48
SLTA 19,19		15,36	17,34	19,59	16,55	18,11
Diatas SLTA	4,05	4,70	4,36	4,16	4,60	4,37

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011- 2012

Gambar 3.7. Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun Keatas, 2009-2012



Dilihat dari komposisi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk selama tahun 2009-2012, tampak menunjukkan perkembangannya yang semakin membaik namun perubahannya tidak cukup signifikan. Penduduk 10 tahun keatas yang

tidak/belum pernah sekolah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun sebaliknya penduduk yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat.

Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. Penduduk yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi (SLTP keatas) di Kota Bandar Lampung dan Metro lebih dari 60 persen sedangkan di kabupaten lain kurang dari 50 persen bahkan Kabupaten Mesuji kurang dari 30 persen.

<http://lampung.bps.go.id>



<http://lampung.bps.go.id>

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Salah satu aspek penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengamati kondisi ketenagakerjaan. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Banyaknya penduduk yang bekerja sangat terkait dengan kemiskinan suatu daerah karena dapat menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan pula banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, banyaknya pengangguran menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Indikator kondisi ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh kedua indikator tersebut adalah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kondisi bulan Agustus, baik pada tahun 2011 dan tahun 2012.

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah Angkatan Kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun formulasi untuk menghitung TPAK adalah :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \%$$

Berbeda dengan TPAK, TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapat pekerjaan. Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	65,94	62,74	11,85	11,71
Perdesaan	68,71	67,49	3,77	3,08
Perkotaan + Perdesaan	68,00	66,27	5,78	5,18

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas 2011-2012

Pada kondisi Agustus 2012, TPAK terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. TPAK tahun 2011 sebesar 68,00 persen, sedangkan tahun 2012 sebesar 66,27 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK perdesaan lebih tinggi dibanding TPAK perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi lebih banyak berada di perdesaan.

Sama halnya dengan TPAK, tahun 2012 TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 5,78 persen menjadi 5,18 persen di tahun 2012. Penurunan terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPT perkotaan jauh lebih tinggi dari perdesaan,

yaitu TPT perkotaan pada tahun 2012 mencapai 11,71 persen sedangkan pada perdesaan hanya 3,08 persen.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa, menurut jenis kelamin, pada kondisi Agustus 2012, TPAK laki-laki terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. TPAK untuk jenis kelamin laki-laki tahun 2011 sebesar 86,86 persen, sedangkan tahun 2012 sebesar 84,41 persen. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan TPAK tahun 2011 sebesar 47,97 persen turun menjadi 47,02 persen pada tahun 2012.

Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Jenis Kelamin, 2011-2012

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3) (4) (5)		
Laki-Laki 86,86		84,41	4,07	3,59
Perempuan 47,97		47,02	9,08	8,22
Laki-laki + Perempuan	68,00	66,27	5,78	5,18

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas 2011-2012

TPT laki-laki dan perempuan juga mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012, seperti pada tabel 4.2 ditunjukkan bahwa TPT laki-laki tahun 2011 sebesar 4,07 persen dan tahun 2012 turun menjadi 3,59 persen. Sedangkan pada tahun 2011 TPT perempuan sebesar 9,08 dan tahun 2012 sebesar 8,22 persen.

Jika dibandingkan tahun 2011 maupun 2012 TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan TPT perempuan. Persentase perempuan yang menganggur terdapat lebih dari dua kali lipat dari persentase laki-laki. Pada keadaan Agustus 2012, TPT perempuan sebesar 8,22 persen, sementara TPT laki-laki sebesar 3,59 persen. Data ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja lebih banyak dimanfaatkan oleh laki-laki daripada perempuan

Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) menurut Kabupaten/Kota, 2012

Kabupaten/Kota	TPAK	TPT
(1) (2)		(3)
Lampung Barat	84,07	2,29
Tanggamus 71,05		3,23
Lampung Selatan	62,36	6,07
Lampung Timur	67,03	2,85
Lampung Tengah	70,54	2,69
Lampung Utara	63,73	8,18
Way Kanan	67,31	3,45
Tulang Bawang	66,27	5,70
Pesawaran 61,32		6,79
Pringsewu 61,26		5,97
Mesuji 63,71		4,43
Tulang Bawang Barat	67,50	1,98
Bandar Lampung	58,46	12,03
Metro 64,51		11,36
Provinsi Lampung	66,27	5,18

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas Agustus 2012

Tabel 4.3 menunjukkan TPAK dan TPT dirinci menurut wilayah di provinsi Lampung, pada keadaan Agustus 2012, Kabupaten Lampung Barat mempunyai angka TPAK tertinggi (84,07 persen) disusul Kabupaten Tanggamus (71,05 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (70,54 persen). Sementara daerah yang mempunyai angka TPAK terendah adalah Kota Bandar Lampung (58,46 persen), Kabupaten Pringsewu (61,26 persen), dan Kabupaten Pesawaran (61,32 persen).

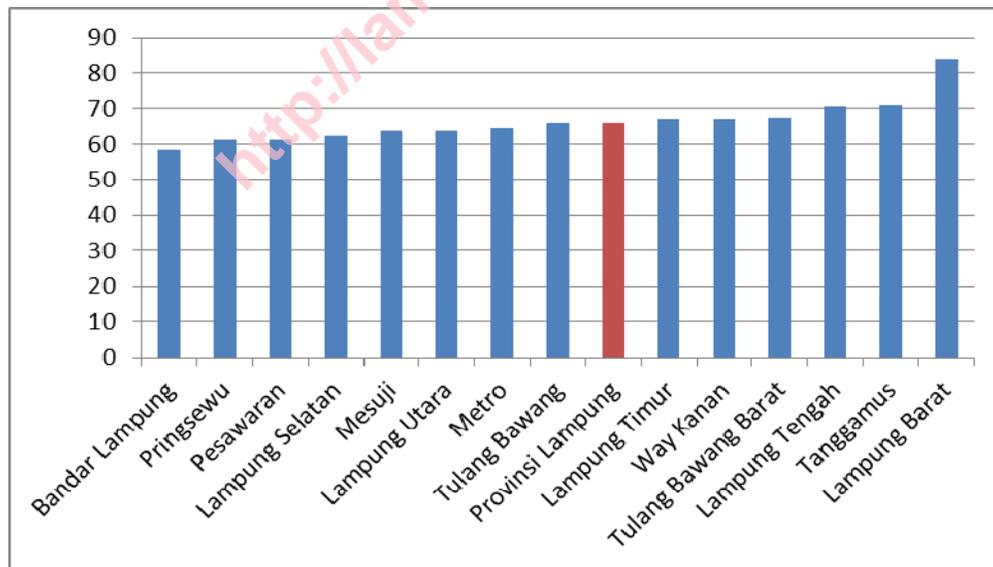
TPAK yang tinggi masih terdapat di wilayah kabupaten dengan ciri-ciri daerah perdesaan yang masih dominan, sedangkan di wilayah dengan ciri-ciri daerah perkotaan yang lebih menonjol, TPAK masih cenderung lebih rendah.

Untuk 3 (tiga) kabupaten dengan TPT terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat (1,98 persen), Kabupaten Lampung Barat (2,29 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (2,69 persen). Sedangkan TPT tertinggi berada di daerah Kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebesar 12,03 persen dan 11,36 persen.

Keadaan ini masih memperlihatkan bahwa pada umumnya proporsi pengangguran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di daerah pedesaan.

Gambar 4.1 memperlihatkan TPAK mulai dari wilayah yang terendah sampai yang tertinggi, serta posisinya di lihat dari angka provinsi. Kota Bandar Lampung (58,46 persen), Kabupaten Pringsewu (61,26 persen), Kabupaten Pesawaran (61,32 persen), Kabupaten Lampung Selatan (62,36 persen), Kabupaten Mesuji (63,71 persen), Kabupaten Lampung Utara (63,73 persen), Kota Metro (64,51 persen), Kabupaten Tulang Bawang (66,27 persen) merupakan kabupaten/kota dengan TPAK dibawah TPAK Provinsi Lampung (66,27 persen). Sedangkan TPAK di atas TPAK Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur (67,03 persen), Kabupaten Way Kanan (67,31 persen), Kabupaten Tulang Bawang Barat (67,50 persen), Kabupaten Lampung Tengah (70,54 persen), Kabupaten Tanggamus (71,05 persen) dan Kabupaten Lampung Barat (84,07 persen).

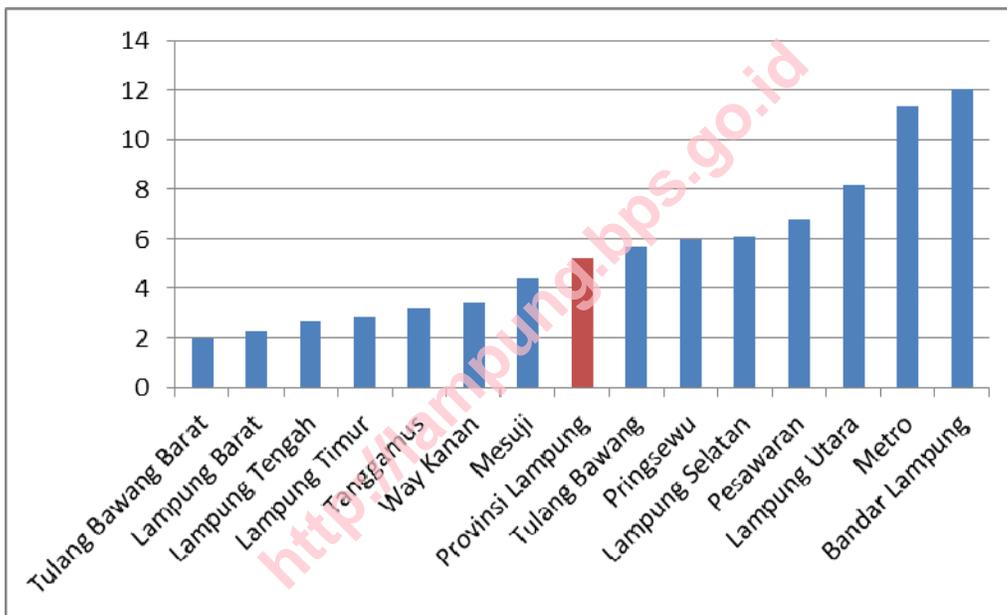
Gambar 4.1. TPAK Provinsi Lampung, 2012



Gambar 4.2 juga memperlihatkan secara lengkap wilayah-wilayah di provinsi Lampung yang TPT-nya di bawah angka TPT provinsi Lampung (5,18 persen) yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (1,98 persen), Kabupaten Lampung Barat (2,29

persen), Kabupaten Lampung Tengah (2,69 persen), Kabupaten Lampung Timur (2,85 persen), Kabupaten Tanggamus (3,23 persen), Kabupaten Way Kanan (3,45 persen), dan Kabupaten Mesuji (4,43 persen), sedangkan wilayah-wilayah yang TPT-nya di atas angka provinsi adalah Kabupaten Tulang Bawang (5,7 persen), Kabupaten Pringsewu (5,97 persen), Kabupaten Lampung Selatan (6,07 persen), Kabupaten Pesawaran (6,79 persen), Kabupaten Lampung Utara (8,18 persen), Kota Metro (11,36 persen) dan Kota Bandar Lampung (12,03 persen)

Gambar 4.2 TPT Provinsi Lampung, 2012



BAB V
TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali an tara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari masing-masing 2000 kkal dan 52 gram protein.

Tabel 5.1. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2009-2012

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2009	1 857,53	1 978,40	1 945,76
2010	1 844,40	1 994,09	1 953,67
2011	1 781,18	2 031,53	1 967,20
2012	1 754,44	1 924,28	1 880,60
2013	1 666,22	1 880,24	1 825,27
Protein (gram)			
2009	52,86	50,98	51,49
2010	52,48	52,89	52,78
2011	51,43	53,30	52,82
2012	50,70	51,03	50,95
2013	46,42	50,11	49,13

Sumber: BPS, Susenas Panel 2009- 2010 dan Susenas Triwulan Maret 2011-2013

Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Lampung pada tahun 2012 masih berada di bawah standar kecukupan yakni 1.825,27 kkal. Demikian pula dengan rata-rata konsumsi protein sudah berada di atas standar kecukupan yakni sebesar 49,13 gram protein. Selama tiga tahun terakhir konsumsi kalori maupun protein mengalami penurunan baik untuk penduduk yang tinggal di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Penduduk di daerah perdesaan (1.880,24 kkal) mengkonsumsi energi lebih banyak dibandingkan penduduk di daerah perkotaan (1.666,22 kkal). Begitu pula dengan rata-rata konsumsi protein penduduk di daerah perdesaan (50,11 gram) lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan (46,42 gram).

5.2 Pengeluaran Rumah Tangga

Data pengeluaran (dalam rupiah) yang dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk. Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2. Pengeluaran Rata-rata Nominal dan Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2009-2013

Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	
2009	183 147	167 708	52,20	47,80
2010	219 887	191 716	53,42	46,58
2011	261 519	228 662	53,35	46,65
2012	283 870	233 840	54,83	45,17
2013	314 408	259 226	54,81	45,19

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007- 2010 dan Susenas Triwulan I 2011

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan pengeluaran rata-rata nominal baik pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan dari tahun 2009 ke tahun 2011. Persentase pengeluaran untuk makanan terjadi penurunan dari 53,42 persen (2010) menjadi 53,35 persen (2011). Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2011 (46,65 persen) meningkat dibandingkan tahun 2010 (46,58 persen). Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pengeluaran untuk bukan makanan persentasenya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2011 terjadi kecenderungan bahwa konsumsi bukan makanan menjadi prioritas penduduk dalam membelanjakan uangnya.

Pada tabel 5.3 terlihat bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran per kapita penduduk semakin tinggi pula pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini wajar karena pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Tabel 5.3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp), 2011

Golongan pengeluaran per kapita sebulan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan dan Bukan Makanan
(1) (2)		(3)	(4)
< 100 000	77 037	15 071	92 107
100 000 - 149 999	96 587	42 555	139 042
150 000 - 199 999	122 557	53 090	175 647
200 000 - 299 999	169 200	79 407	248 607
300 000 - 499 999	245 328	140 649	385 977
500 000 - 749 999	360 797	245 915	606 712
750 000 - 999 999	418 200	444 488	862 688
1 000 000 dan lebih	502 814	1 236 745	1 739 559
Rata-rata per kapita	261 519	228 662	490 180

Sumber: BPS, Susenas Triwulan I 2011

5.3 Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Tabel 5.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan Indeks Gini, 2007-2011

Tahun	40 % ber-pengeluaran rendah	40 % ber-pengeluaran sedang	20 % ber-pengeluaran tinggi	Indeks Gini
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(5)
2007	17,94	34,66	47,40	0,39
2008	20,24	36,00	43,76	0,35
2009	21,15	36,37	42,48	0,35
2010	20,08	37,33	42,60	0,36
2011	19,27	35,68	45,06	0,37

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 – 2010 dan Susenas Triwulan 1 2011

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- Memperoleh <12, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi
- Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang
- Memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah

Pada tahun 2011 terlihat bahwa 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 19,27 persen dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

Membandingkan antara tahun 2010 dan 2011 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran terendah mengalami penurunan yaitu dari 20,08 persen menjadi 19,27 persen, begitu pula dengan penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran sedang yaitu dari 37,33 persen menjadi 35,68 persen. Namun pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi peningkatan persentase yaitu dari

42,60 persen menjadi 45,06 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk secara umum tahun 2011 cenderung memburuk dibandingkan dengan tahun 2010.

Nilai dari Indeks Gini berkisar 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Indeks Gini dua tahun terakhir yaitu 0,36 pada tahun 2010 menjadi 0,37 pada tahun 2011. Berdasarkan angka Indeks Gini yang jauh berada di bawah angka 1 ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk antar kelompok pengeluaran di Provinsi Lampung masih tergolong rendah namun pola distribusi pengeluaran penduduk memburuk.

BAB VII

PERUMAHAN

Sebagaimana dia manatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas tempat buang air besar.

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki dinding, atap dan lantai. Disamping itu kualitas dari ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi penghuninya. Berdasarkan data Susenas 2012, dapat diketahui persentase rumah tangga berdasarkan kualitas rumah tinggal yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 7.1. menunjukkan indikator kualitas perumahan di Provinsi Lampung dari tahun 2011–2012, ada indikator-indikator yang naik dan ada pula yang turun tetapi tidak begitu signifikan. Indikator yang mengalami peningkatan antara lain indikator lantai bukaan tanah dan atap layak. Tahun 2011 lantai bukaan tanah sebesar

86,90 persen naik menjadi 88,52 persen dan atap layak tahun 2012 naik dari 99,35 persen tahun 2011 menjadi 99,42 persen.

Sedangkan indikator perumahan yang mengalami penurunan adalah dinding permanen dan rata-rata luas lantai. Tahun 2012 dinding permanen turun menjadi 88,18 persen dari tahun 2011 sebesar 88,41 persen. Rata-rata luas lantai tahun 2011 sebesar 70,25 persen dan turun menjadi 70,18 persen di tahun 2012.

Jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan, kualitas perumahan di daerah perkotaan masih lebih baik di bandingkan daerah perdesaan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 persentase indikator-indikator perumahan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Lantai bukan tanah daerah perkotaan sebesar 96,96 persen sedangkan di perdesaan sebesar 85,77 persen. Begitu pula atap layak, dinding permanen dan rata-rata luas lantai berturut-turut di daerah perkotaan sebesar 96,96 persen, 92,28 persen, dan 76,23 persen masih lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yang sebesar 99,25 persen, 86,84 persen, dan 68,20 persen.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Indikator kualitas perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai bukan tanah	96,67	96,96	83,75	85,77	86,90	88,52
Atap Layak ¹⁾ 99	,86	99,96	99,19	99,25	99,35	99,42
Dinding Permanen ²⁾ 92	,50	92,28	87,09	86,84	88,41	88,18
Rata-rata luas lantai (m ²) 77	,37	76,23	67,95	68,20	70,25	70,18

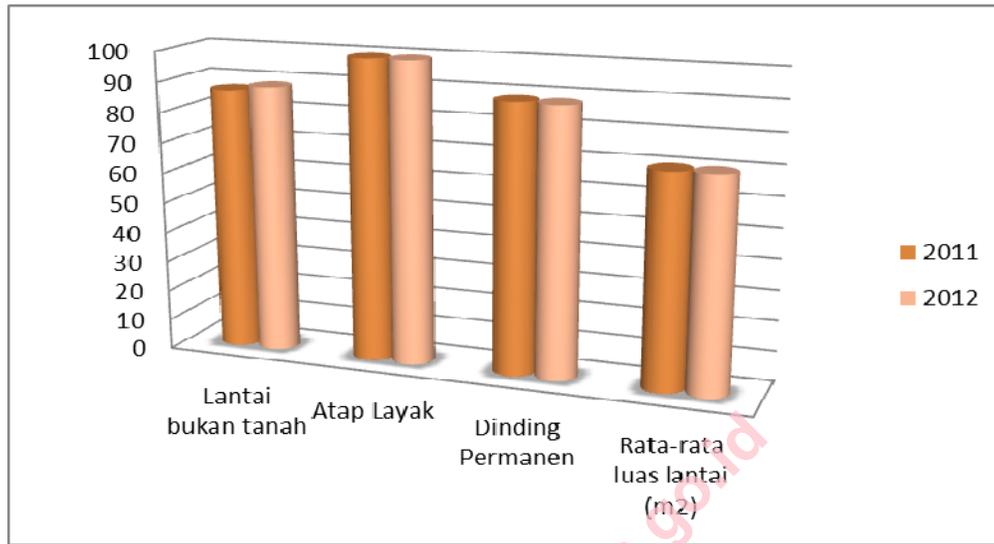
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Catatan : 1) Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes

2) Dinding permanen : tembok dan kayu

Gambar 7.1 memperlihatkan beberapa indikator perumahan seperti lantai bukan tanah, atap layak, dinding permanen dan rata-rata luas lantai pada tahun 2011 dan 2012. Dari gambar tersebut dapat dilihat dengan mudah indikator-indikator yang mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011-2012.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2011-2012



Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Tahun 2011, rumah tangga di Provinsi Lampung yang menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minum baru mencapai 16,80 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 mencapai 16,85 persen, artinya ada peningkatan meskipun hanya sebesar 0,05 persen rumah tangga yang menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber utama untuk minum (Tabel 7.2).

Tahun 2012 umumnya pengguna air minum ledeng dan air kemasan adalah rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu 45,88 persen, sedangkan di perdesaan hanya 7,38 persen. Tingginya pengguna air minum ledeng dan air kemasan di daerah perkotaan dimungkinkan karena fasilitas di daerah perkotaan lebih tersedia, khususnya untuk air minum ledeng.

Selain penggunaan air minum ledeng dan air kemasan, ketersediaan air minum bersih yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) lebih dari 10 meter menentukan tingkat kenyamanan dari rumah tinggal. Tabel 7.2. menunjukkan bahwa rumah tangga yang menggunakan air minum bersih di Provinsi Lampung mencapai 50,48 persen tahun 2011, dan mengalami penurunan menjadi 49,70 persen tahun 2012.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Indikator kualitas perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Air minum ledeng & kemasan	44,00	45,88	8,03	7,38	16,80	16,85
Air minum bersih*)	67,84	70,41	44,89	42,94	50,48	49,70
Jamban sendiri	81,20	84,58	75,62	75,02	76,98	77,38

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

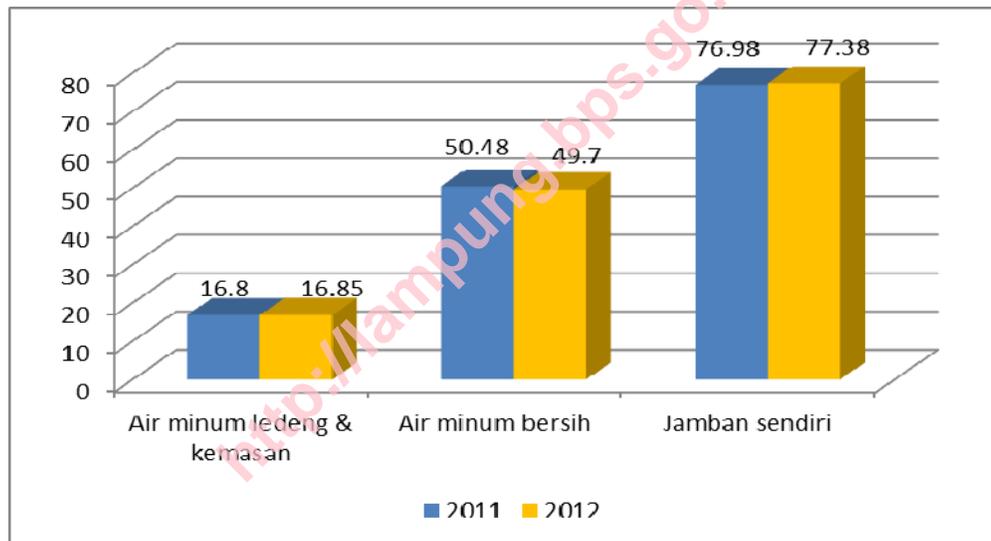
*) Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) >10 m

Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum bersih di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu sebesar 70,41 persen di perkotaan dan 42,94 persen di perdesaan pada tahun 2012.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri.

Selama tahun 2011-2012 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, tahun 2011 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 76,98 persen dan naik menjadi 77,38 persen di tahun 2012. Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang mengalami kenaikan berada di daerah perkotaan dari tahun 2011 sebesar 81,20 persen menjadi 84,58 persen di tahun 2012. Sedangkan untuk wilayah perdesaan mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yaitu 75,62 persen pada tahun 2011 dan turun menjadi 75,02 persen pada tahun 2012.

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2011-2012



Fasilitas perumahan selain kualitas dinding, atap, dan lantai serta ketersediaan air minum dan jamban, yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik, karena cahaya yang dihasilkan dari listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya, seperti petromak, pelita, sentir ataupun obor.

Berdasarkan data Susenas, penerangan listrik yang dimaksud adalah penerangan listrik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, untuk penerangan yang bersumber dari PLN termasuk juga rumah tangga yang menggunakan listrik tanpa meteran ataupun menyambung dari rumah tangga lain.

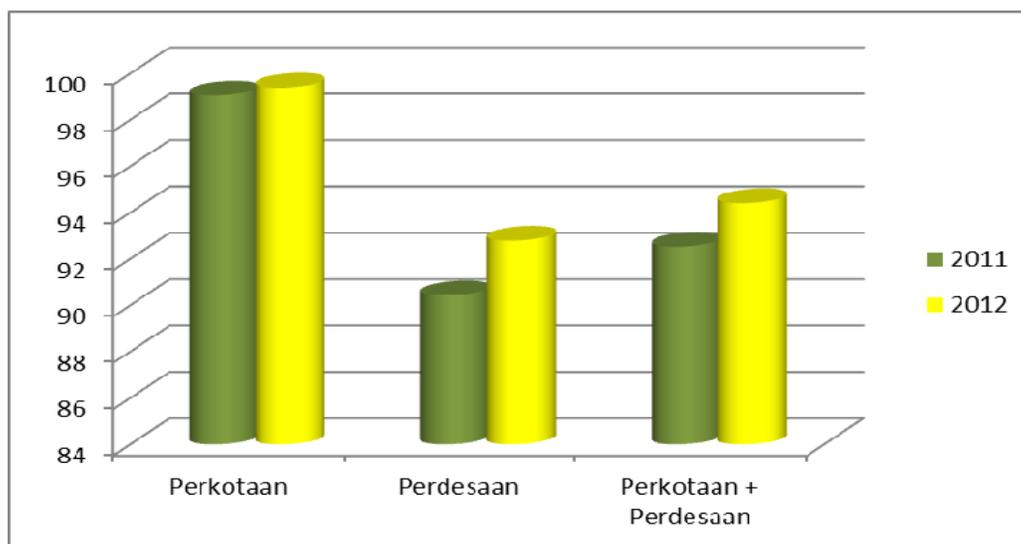
Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Daerah Tempat Tinggal	Tahun	
	2011	2012
(1) (2)		(3)
Perkotaan	99,05	99,39
Perdesaan	90,43	92,79
Perkotaan + Perdesaan	92,53	94,41

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Berdasarkan tabel 7.3 pada tahun 2011 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama di Provinsi Lampung sebesar 92,53 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 94,41 persen. Apabila dilihat dari wilayahnya peningkatan juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Pada tahun 2011 rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di daerah perkotaan sebesar 99,05 persen dan naik menjadi 99,39 persen di tahun 2012, Sedangkan di perdesaan juga mengalami peningkatan dari 90,43 persen di tahun 2011 menjadi 92,79 persen di tahun 2012.

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012



BAB VIII

SOSIAL LAINNYA

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan perjalanan "wisata", persentase penduduk yang menikmati informasi dan hiburan, meliputi akses terhadap internet dan persentase rumah tangga yang menguasai media informasi seperti telepon, telepon seluler dan komputer, serta persentase rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (raskin).

Kegiatan "wisata" dapat menunjukkan kesejahteraan seseorang karena wisata merupakan kebutuhan tersier. Umumnya semakin sejahtera seseorang, maka semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer. Sedangkan kepemilikan dan akses terhadap media informasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang yang dapat merubah pandangan dan cara hidupnya kearah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang. Sedangkan persentase rumah tangga yang membeli raskin menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang memanfaatkan program pemerintah dalam mensejahterakan rumah tangga miskin.

8.1. Perjalanan Wisata

Konsep perjalanan "wisata" yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (pp) sejauh minimal 100 kilometer dan tidak dalam rangka memberi nafkah serta tidak dilakukan secara rutin. Berdasarkan konsep ini, maka data tabel 8.1 menunjukkan bahwa selama periode 2010-2012 persentase penduduk Provinsi Lampung yang melakukan

perjalanan "wisata" terus mengalami peningkatan yaitu 9,67 persen tahun 2010 naik menjadi 10,22 persen tahun 2011 dan menjadi 10,52 persen tahun 2012.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2012

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1) (2)		(3)	(4)
2010	12,96	8,55	9,67
2011	12,28	9,51	10,22
2012	13,60	9,43	10,52

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012

Jika dibandingkan antar wilayah, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan dapat diketahui bahwa penduduk yang melakukan perjalanan "wisata" dari tahun ke tahun lebih banyak di daerah perkotaan yaitu pada tahun 2010 di daerah perkotaan sebesar 12,96 persen dan di perdesaan sebesar 8,55 persen, tahun 2011 di perkotaan sebesar 12,28 persen dan di perdesaan 9,51 persen, tahun 2012 di perkotaan sebesar 13,60 persen dan di perdesaan 9,43 persen.

8.2 Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media massa dan media elektronik, seperti komputer. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer. Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang sudah menguasai komputer tahun 2011 sebesar 8,12 persen, meningkat dibandingkan tahun 2012 menurun menjadi 3,82 persen. Komputer yang dimaksud adalah berupa personal *computer/desktop* tidak termasuk *laptop* atau *notebook*.

Jika dilihat tahun 2012, rumah tangga yang menguasai lebih dominan di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Di daerah perkotaan persentase rumah tangga yang mempunyai komputer mencapai 10,79 persen jauh lebih tinggi bila dibandingkan daerah perdesaan yang hanya mencapai 1,55 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan komputer masih terbatas pada kalangan tertentu.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telepon rumah	11,17	8,91	1,87	2,01	4,14	3,71
Telepon seluler	90,10	94,21	78,40	83,55	81,25	86,17
Komputer	21,07	10,79	3,94	1,55	8,12	3,82

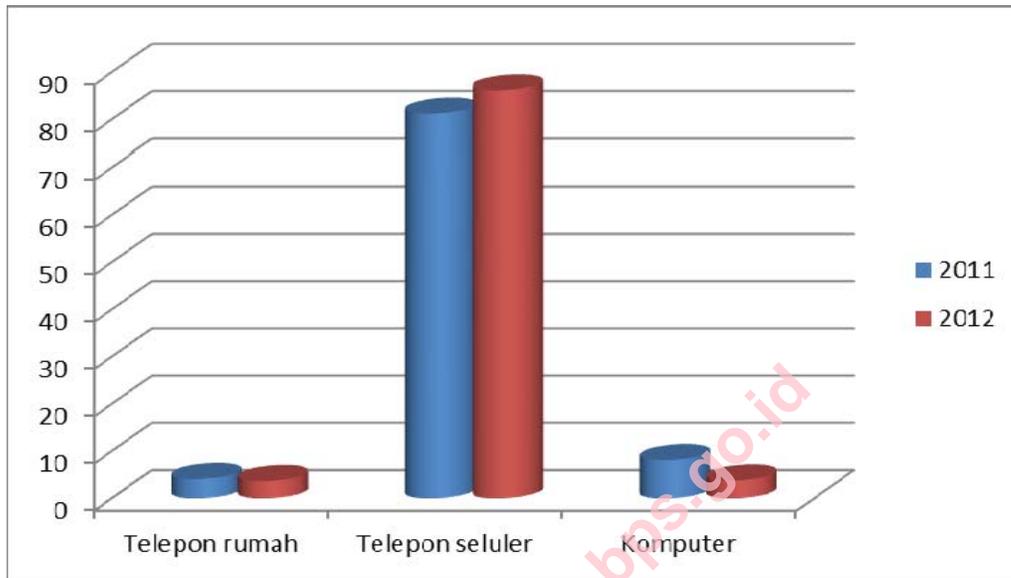
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan dengan telepon rumah, karena harga telepon seluler maupun pulsananya cukup bersaing dibandingkan dengan telepon rumah, telepon seluler juga lebih diminati karena lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi dimanapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan yang semakin meluas.

Hal ini dapat ditunjukkan dari lebih rendahnya persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah dibandingkan yang menguasai telepon seluler. Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa selama tahun 2011-2012 rumah tangga yang menguasai telepon rumah mengalami penurunan sebesar 0,46 persen, Tahun 2011 persentase rumah tangga yang menguasai telepon rumah mencapai 4,14 persen dan tahun 2012 hanya sebesar 3,71 persen.

Sedangkan persentase rumah tangga yang menguasai telepon seluler meningkat cukup pesat selama tahun 2011-2012, dari 81,25 persen tahun 2011 menjadi 86,17 persen tahun 2012, artinya di Provinsi Lampung ada peningkatan sebesar 4,92 persen selama kurun waktu satu tahun. Peningkatan persentase rumah tangga yang menguasai telepon seluler ini terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan, dimana di daerah perkotaan peningkatannya sebesar 5,15 persen dan daerah perdesaan peningkatannya sebesar 4,11 persen dari tahun 2011-2012..

Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2011-2012



8.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain da ri a spek kesejahteraan yang dilihat da ri ke giatan melakukan perjalanan "wisata" dan a kses tekonologi d an infor masi yang dica kup dal am Susenas. D alam sub bab ini keadaan so sial ekonomi ru mah tangga h anya dibatasi pada banyaknya rumah tangga yang membeli beras miskin (raskin).

Raskin merupakan be ras murah y ang dised iakan oleh Bulog/Dolog dan diperuntukkan khusus unt uk rumah tangga miskin, raskin dapat dip eroleh d engan cara membeli di tempat-tempat y ang sudah ditentuk an. D ata mengenai raskin di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 8.3.

Tahun 20 12, persentase ru mah tangga pe mbeli raskin di P rovinsi L ampung lebih sedikit diband ingkan pad a tah un 2011. Tah un 2012 persen tase rum ah tangga pembeli raskin h anya sebesar 64,46 persen sedangk an tahun 2011 mencapai 65,65 persen rumah. Ji ka dilihat dari wilayah, daerah perdesaan persentase rumah tangga pembeli raskinnya lebih tinggi dib andingkan perkotaan, yaitu sebesar 71,51 persen sedangkan di perkotaan sebesar 42,84 persen.

Sedangkan ra ta-rata raskin yang dibeli sela ma 3 bulan ter akhir adalah 9,04 kilogram per rumah tangga, le bih sedi kit dibandingk an dengan tahun 2011 sebesar

9,79 kilogram dengan harga rata-rata per kilogram Rp. 2.086,77 pada tahun 2011 dan Rp. 2.091,99 per kilogramnya di tahun 2012.

Tabel 8.3. Indikator- Indikator Raskin menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2012

Indikator- Indikator Raskin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumahtangga pembeli raskin (%)	43,87	42,84	72,67	71,51	65,65	64,46
Rata-rata raskin yang dibeli selama 3 bulan (kg)	9,22	8,25	9,90	9,19	9,79	9,04
Rata-rata harga raskin per kg (Rp)	2.103,63	2.971,06	2.083,49	2.096,08	2.086,77	2.091,99

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2011-2012

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<http://lampung.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 - Bandar Lampung

Telp : (0721)482909 Fax : (0721) 484329

homepage : lampung.bps.go.id Email : bps1800@bps.go.id



1 9 0 7 - 4 5 7 3